



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANATAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Pontianak;
 - b. bahwa Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan asas efisiensi, efektifitas, transparansi dan bertanggungjawab;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Pontianak.
5. Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil ketua DPRD Kota Pontianak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Pontianak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunkasi intensif, Tunjang Reses dan Dana Operasional Pimpinan.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Penghasilan adalah hak keuangan yang diberikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD atas pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya yang terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan DPRD, tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses.
11. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mendorong peningkatan kesejahteraannya yang terdiri dari jaminan kesehatan dan *medical check up*, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, rumah negara dan perlengkapannya/tunjangan perumahan, belanja rumah tangga, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD/tunjangan transportasi Pimpinan DPRD, tunjangan transportasi anggota DPRD, pakaian dinas dan uang jasa pengabdian.
12. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
13. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti kegiatan rapat-rapat DPRD.
15. Tunjangan Jabatan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan Anggota DPRD.
16. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris atau anggota Alat Kelengkapan DPRD.
17. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dalam menampung dan menyalurkan aspirasi di daerah pemilihannya.
18. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat menyediakan rumah negara beserta kelengkapannya.
19. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai dengan Pengucapan Sumpah atau Janji dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan Dinas bagi Pimpinan atau Kendaraan Dinas bagi Anggota DPRD tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
20. Tunjangan Reses adalah tunjangan berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses dalam rangka untuk menjaring, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD diberikan kepada setiap orang yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.
21. Jaminan Kecelakaan Kerja adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.

22. Belanja Rumah Tangga adalah belanja kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya.
23. Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD yang selanjutnya disebut DO Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam rangka penyediaan atau pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan asas efisiensi, efektifitas, transparansi dan bertanggungjawab.

Pasal 4

Ruang Lingkup disusunnya Peraturan Walikota ini adalah:

- a. uang representasi;
- b. uang paket;
- c. tunjangan jabatan;
- d. tunjangan alat kelengkapan dan alat kelengkapan lainnya;
- e. tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses pimpinan dan anggota DPRD;
- f. tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
- g. belanja rumah tangga pimpinan DPRD;
- h. uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD;
- i. dana operasional pimpinan DPRD;
- j. pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB III

UANG REPRESENTASI

Pasal 5

- (1) Uang representasi pimpinan dan anggota DPRD di berikan setiap bulan.
- (2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Walikota.
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

- (5) Besarnya uang representasi Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD adalah :
- a. Ketua DPRD Rp. 2.100.000;
 - b. Wakil Ketua DPRD $\text{Rp. } 2.100.000 \times 80 \% = \text{Rp. } 1.680.000$; dan
 - c. Anggota DPRD $\text{Rp. } 2.100.000 \times 75 \% = \text{Rp. } 1.575.000$

BAB IV
UANG PAKET
Pasal 6

- (1) Uang paket Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pontianak diberikan setiap bulan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (2) Besaran uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Ketua DPRD $\text{Rp. } 2.100.000 \times 10 \% = \text{Rp. } 210.000$
 - b. Wakil Ketua DPRD $\text{Rp. } 1.680.000 \times 10 \% = \text{Rp. } 168.000$
 - c. Anggota DPRD $\text{Rp. } 1.575.000 \times 10 \% = \text{Rp. } 157.500$

BAB V
TUNJANGAN JABATAN
Pasal 7

- (1) Tunjangan Jabatan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.
- (2) Besaran tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Ketua DPRD $\text{Rp. } 2.100.000 \times 145 \% = \text{Rp. } 3.045.000$;
 - b. Wakil Ketua DPRD $\text{Rp. } 1.680.000 \times 145 \% = \text{Rp. } 2.436.000$; dan
 - c. Anggota DPRD $\text{Rp. } 1.575.000 \times 145 \% = \text{Rp. } 2.283.750$

BAB VI
TUNJANGAN ALAT KELENGKAPAN DAN ALAT KELENGKAPAN LAINNYA
Pasal 8

- (1) Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Kota Pontianak diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan perda, badan kehormatan.
- (2) Besaran tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu:
- a. Ketua $\text{Rp. } 3.045.000 \times 7,5 \% = \text{Rp. } 228.375$;
 - b. Wakil Ketua $\text{Rp. } 3.045.000 \times 5 \% = \text{Rp. } 152.250$;
 - c. Sekretaris $\text{Rp. } 3.045.000 \times 4 \% = \text{Rp. } 121.800$; dan
 - d. Anggota $\text{Rp. } 3.045.000 \times 3 \% = \text{Rp. } 91.350$.

Pasal 9

- (1) Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya DPRD Kota Pontianak diberikan selama alat kelengkapan lainnya terbentuk dan melaksanakan tugas.

- (2) Alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti panitia khusus.
- (3) Besaran tunjangan alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar tunjangan jabatan Ketua DPRD yaitu :
 - a. Ketua $\text{Rp. } 3.045.000 \times 7,5 \% = \text{Rp.}228.375;$
 - b. Wakil Ketua $\text{Rp. } 3.045.000 \times 5 \% = \text{Rp.}152.250;$
 - c. Sekretaris $\text{Rp. } 3.045.000 \times 4 \% = \text{Rp.}121.800;$ dan
 - d. Anggota $\text{Rp. } 3.045.000 \times 3 \% = \text{Rp.}91.350.$

BAB VII
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 10

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 7 (tujuh) X Rp.2.100.000,00 = 14.700.000,00/bulan.

Pasal 11

- (1) Tunjangan Reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Pemberian Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- (3) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 7 (tujuh) X Rp.2.100.000,00 = 14.700.000,00/kegiatan reses.

BAB VIII
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan DPRD atau Rumah Dinas Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan atau Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Perumahan.

Pasal 13

- (1) Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan azas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung pengertian bahwa:
 - a. tunjangan perumahan yang diberikan kepada Anggota DPRD besarnya tidak boleh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai rumah jabatan yang ditempati oleh Pimpinan apabila disewakan;

- b. tunjangan perumahan Anggota DPRD tidak boleh lebih besar dari tunjangan perumahan wakil Ketua DPRD;
- c. tunjangan Perumahan Wakil Ketua DPRD tidak boleh lebih besar dari tunjangan perumahan Ketua DPRD;
- d. tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh lebih tinggi dari tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi; dan
- e. besarnya tunjangan perumahan yang dibayarkan, disetarakan dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku umum, tidak termasuk meubelair, biaya listrik, air, gas dan telpon.

Pasal 14

- (1) Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- (2) Besarnya uang tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD Sebesar Rp. 16.500.000,-/bulan/orang;
 - b. Wakil Ketua DPRD Sebesar Rp. 15.500.000,- /bulan/orang; dan
 - c. Anggota DPRD Sebesar Rp. 14.500.000,- /bulan/orang.
- (3) Uang Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar setiap bulan dihitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

Pasal 15

Dalam hal Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD dilaksanakan tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, maka uang tunjangan perumahan yang dibayar pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya diperhitungkan sebagai pembayaran tunjangan perumahan untuk masa 1 (satu) bulan dihitung mulai tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Pasal 16

- (1) Tunjangan Transportasi yang di bayarkan harus sesuai dengan standar harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan dan Anggota DPRD tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (2) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- (3) Standar biaya Tunjangan Transportasi pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari:
 - a. Ketua DPRD standar 2.500 CC;
 - b. Wakil Ketua DPRD standar 2.200 CC; dan
 - c. Anggota DPRD standar 2.000 CC.
- (4) Besaran uang tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c untuk Anggota DPRD sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

BAB IX
BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DPRD
Pasal 17

- (1) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya tidak diberikan belanja rumah tangga .
- (5) Belanja Rumah Tangga pimpinan DPRD terdiri dari :
 - a. belanja makan minum harian; dan
 - b. belanja makan minum tamu pada saat hari Raya Keagamaan.
- (6) besaran belanja rumah tangga pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah Rp. 95.000,00 perorang perhari.
- (7) besaran belanja rumah tangga pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah Rp. 50.000.000 1(satu) kali per tahun.

BAB X
UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
Pasal 18

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi:
 1. Ketua DPRD Rp. 2.100.000
 2. Wakil Ketua DPRD Rp. 2.100.000 X 80 % = Rp. 1.680.000
 3. Anggota DPRD Rp. 2.100.000 X 75 % = Rp. 1.575.000
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi:
 1. Ketua DPRD Rp. 2.100.000 X 2 = Rp.4.200.000
 2. Wakil Ketua DPRD Rp. 1.680.000 X 2 = Rp.3.360.000
 3. Anggota DPRD Rp. 1.575.000 X 2 = Rp.3.150.000
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi:
 1. Ketua DPRD Rp. 2.100.000 X 3 = Rp. 6.300.000
 2. Wakil Ketua DPRD Rp. 1.680.000 X 3 = Rp.5.040.000
 3. Anggota DPRD Rp. 1.575.000 X 3 = Rp. 4.725.000

- d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi:
1. Ketua DPRD Rp. 2.100.000 X 4 = Rp. 8.400.000
 2. Wakil Ketua DPRD Rp. 1.680.000 X 4 = Rp.6.720.000
 3. Anggota DPRD Rp. 1.575.000 X 4 = Rp.6.300.000
- e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi;
1. Ketua DPRD Rp. 2.100.000 X 6 = Rp.12.600.000
 2. Wakil Ketua DPRD Rp. 1.680.000 X 6 = Rp.10.080.000
 3. Anggota DPRD Rp. 1.575.000 X 6 = Rp.9.450.000
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB XI
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
Pasal 19

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 20

- (1) Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD apabila kemampuan keuangan Daerah tinggi, maka Dana Operasional Pimpinan DPRD disediakan :
 - a. dana operasional Ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali dari uang representasi Ketua DPRD; dan
 - b. dana operasional Wakil Ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 4 (empat) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD apabila kemampuan keuangan Daerah sedang, maka Dana Operasional Pimpinan DPRD disediakan :
 - a. dana operasional Ketua DPRD disediakan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD; dan

- b. dana operasional Wakil Ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (3) Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD apabila kemampuan keuangan Daerah rendah, maka Dana Operasional Pimpinan DPRD disediakan:
 - a. dana operasional Ketua DPRD disediakan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
 - b. dana operasional Wakil Ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (4) Besaran Dana Operasional Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling banyak sebesar 6 (enam) kali dari uang representasi ketua DPRD yaitu sebesar :
 - (6 X Rp. 2.100.000)
 - = Rp. 12.600.000
- (5) Besaran Dana Operasional Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak sebesar 4 (empat) kali dari uang representasi Wakil ketua DPRD yaitu sebesar :
 - (4 X Rp. 1.680.000)
 - = Rp. 6.720.000
- (6) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

BAB XII

PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Pasal 21

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan dana operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan dana operasional sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan :
 - a. daftar penerima dana operasional; dan
 - b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk dana operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD.

Pasal 22

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) melakukan pembayaran dana operasional yang di berikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani oleh ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) mengelola dana operasional untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan dana operasional.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan dana operasional bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.
- (7) Dalam hal terdapat sisa dana operasional yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat dewan menyetor sisa dana operasional ke kas daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2011 tentang Jaminan Pemeliharaan dan Kesehatan, Tunjangan Perumahan dan Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 33);
2. Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2011 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Tunjangan Perumahan dan Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 48); dan
3. Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2011 tentang Jaminan Pemeliharaan dan Kesehatan, Tunjangan Perumahan dan Belanja Penunjang Operasional (BPO) Pimpinan DPRD (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 2), dicabut dan di nyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 31 Agustus 2017

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 31 Agustus 2017

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

ZUMYATI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2017 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ZETMAWATI SH, MH

Pembina Tk I (IV b)

NIP. 19620811 198607 2 002

